



**MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
BERBASIS AKRUAL**

**AKUNTANSI BEBAN
DAN
AKUNTANSI BELANJA**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH**

Definisi

1. **Beban** adalah **penurunan manfaat ekonomi** atau **potensi jasa** dalam periode pelaporan yang **menurunkan ekuitas**, yang dapat berupa **pengeluaran** atau **konsumsi aset** atau **timbulnya kewajiban**.
2. Belanja merupakan semua **pengeluaran** oleh **Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah** yang **mengurangi Saldo Anggaran Lebih** dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

Perbedaan Beban dan Belanja

No	Beban	Belanja
a.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c.	Menggunakan Kode Akun 9	Menggunakan Kode Akun 5

Klasifikasi

- Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga
- Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah provinsi/kota/kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi/kota/kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi/kota/kabupaten.

PENGAKUAN

- **Timbulnya Kewajiban**

Saat timbulnya kewajiban adalah **saat** terjadinya **peralihan hak** dari pihak lain ke pemerintah **tanpa** diikuti **keluarnya kas** dari kas umum daerah.

- **Terjadinya Konsumsi Aset**

Terjadinya konsumsi aset adalah **saat pengeluaran kas** kepada pihak lain yang **tidak didahului** timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

- **Terjadinya Penurunan masa manfaat**

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada **saat penurunan nilai aset** sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu

Metode Pengakuan Beban

- **Pendekatan Beban**

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat **sebagai beban** jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk **digunakan atau konsumsi segera mungkin**

- **Pendekatan Aset**

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat **sebagai persediaan** jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk **sifatnya berjaga jaga**

FÄ ääÜ^} **~ } ää
GÄ ä -ä
HÄ ä : ää

Pengukuran

- Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
- Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Penilaian

- Beban dinilai sebesar **akumulasi beban** yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).
- Belanja dinilai sebesar **nilai tercatat** dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

SAPD Beban dan Belanja SKPD

Pihak Pihak yang Terkait

- PPK SKPD
- Bendahara Pengeluaran

Dokumen yang digunakan

- Daftar Gaji,
- SP2D
- NPHD
- Surat Perjanjian
- Surat Keputusan Kepala Daerah
- BAST.
- Dokumen yang dipersamakan.
- Bukti memorial

Jurnal Standar

- Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme **LS** dimana pembayaran tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing **PNSD**
- Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXX	XXXXX	X.X.X.XX.XX	Beban Gaji Pokok	XXX	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		XXX

- Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXX	XXXXX	X.X.X.XX.XX	Belanja Gaji Pokok	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

- Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayaran **ditransfer ke Bendahara Pengeluaran** kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing masing PNS

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		XXX
		X.X.X.XX.XX	Beban Gaji Pokok	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas di bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Gaji Pokok	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

A. Pencatatan terhadap Potongan Fihak Ketiga (PFK):

1. Saat Potong

Kas di Bendahara Pengeluaran

Utang PFK - Iuran Wajib Pegawai

Utang PFK - Tabungan Perumahan pegawai

2. Saat Setor

Utang PFK - Iuran Wajib Pegawai

Utang PFK - Tabungan Perumahan pegawai

kas di bendahara Pengeluaran

B. Komponen Pajak PPH psl 21

1. Saat Potong

Kas di Bendahara Pengeluaran

Utang Pajak - PPh psl 21

2. Saat Setor Utang PFK

Utang Pajak - PPh Psl 21

kas di bendahara Pengeluaran

Beban dan Belanja pegawai (**misalnya pembayaran lembur**) yang pembayarannya melalui mekanisme **UP/GU/TU** dimana pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran ke **masing masing PNS**

Saat terima kas (SP2D-Up/Gu/TU)
 Kas di bendahara pengeluaran
 R/k PPKD

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Beban Uang Lembur	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Belanja Uang lembur	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

Belanja Barang dan Jasa Pendekatan Beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat **sebagai beban** jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk **digunakan atau konsumsi segera mungkin**

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXX	XXXXX	X.X.X.XX.XX	Beban Persediaan ATK	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja barang dan jasa		XXX

Kemudian Dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D LS maka jurnal standar

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXX	XXXXX	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja	XXX	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXX	XXXXX	X.X.X.XX.XX	Belanja ATK	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXX	XXXXX	X.X.X.XX.XX	Beban Persediaan ATK	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXX	XXXXX	X.X.X.XX.XX	Belanja ATK	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

Pendekatan aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat **sebagai persediaan** jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk **sifatnya berjaga jaga**

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Persediaan ATK	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja barang dan jasa		XXX

- Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D. LS maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja barang dan jasa	XXX	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Belanja ATK	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

Beban Hibah dan Bansos

Pendekatan Beban

SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan Barang dan jasa tersebut telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan akan tetapi **belum dilakukan pembayaran**, serta kemudian barang tersebut langsung diserahkan ke penerima hibah bersamaan dengan NPHD atau dokumen yang sah ditanda tangani maka jurnal standar:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Beban Barang dan jasa yang akan diserahkan kpd Masyarakat	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Barang dan jasa		XXX

Kemudian PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS maka pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal standar :

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXX	XXXXX	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Barang dan jasa	XXX	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXX	XXXXX	X.X.X.XX.XX	Belanja barang dan jasa dihibahkan kepada Masyarakat	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

Beban Hibah dan Bansos

Pendekatan Aset

SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan Barang dan jasa tersebut telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan akan tetapi belum dilakukan pembayaran, serta NPHD/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/Dokumen yang dipersamakan telah ditanda tangani akan tetapi barang tersebut belum diserahkan ke ke penerima hibah

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Persediaan Barang diserahkan kpd Masyarakat	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Barang		XXX

- Kemudian PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS maka pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal standar

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXX	XXXXX	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Brg	XXX	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXX	XXXXX	X.X.X.XX.XX	Belanja Hibah kpd Masyarakat	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

Beban Penyusutan

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan SKPD jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Beban Penyusutan	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Akum. Penyusutan ...		XXX

Beban Penyisihan

Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Jurnal standar beban penyisihan piutang:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Beban Penyisihan Piutang	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Penyisihan Piutang		XXX

SAPD Beban dan Belanja PPKD

Pihak Pihak yang Terkait

- PPK SKPD
- Bendahara Pengeluaran

Dokumen yang digunakan

- SP2D
- NPHD
- Surat Perjanjian
- Surat Keputusan Kepala Daerah
- BAST.
- Dokumen yang dipersamakan.
- Bukti memorial

Beban Bunga

Pemerintah Daerah menandatangani Perjanjian Utang dengan pihak ketiga, dimana konsukuensi dari utang tersebut akan timbul adanya kewajiban bunga, berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Beban Utang Bunga Pinjaman	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Utang Bunga Pinjaman		XXX

Beban Bunga

Pemerintah Daerah melakukan pembayaran bunga dengan mekanisme SP2D LS berdasarkan pembayaran SP2D LS maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Utang Bunga Pinjaman	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas dikas daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Belanja bunga pinjaman	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

Beban Subsidi

Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian subsidi kepada entitas lain. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar :

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Beban Subsidi kpd BUMD	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Subsidid BUMD		XXX

Beban Subsidi

Kemudian Pemeritah Daerah melakukan pencairan subsidi dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima subsidi berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar :

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Utang Subsidi	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas dikas daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Belanja Subsidi	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

Beban Hibah

Pemerintah Daerah menerbitkan SK tentang nama nama penerima hibah daerah dan telah menandatangani NPHD /Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian hibah kepada kelompok masyarakat berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar :

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Beban hibah kpd masyarakat	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja lain lain		XXX

Beban Hibah

- Kemudian Pemeritah Daerah melakukan pencairan bantuan hibah dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima hibah dalam bentuk uang berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Utang belanja lain lain	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas dikas daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Belanja hibah kpd masyarakat	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

Beban Bantuan Sosial

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan kepala daerah tentang penerima bantuan sosial berupa uang serta menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan sosial dengan penerima bantuan sosial. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah dan surat perjanjian pemberian bantuan sosial maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Beban bantuan sosial kpd organisasi kemasyarakatan	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja lain lain		XXX

Beban Bantuan Sosial

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan bantuan sosial dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima bantuan sosial dalam bentuk uang berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar :

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXX	XXXXX	X.X.X.XX.XX	Utang belanja lain lain	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas dikas daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXX	XXXXX	X.X.X.XX.XX	Belanja bantuan sosial kpd organisasi masyarakat	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

Beban Transfer Bagi hasil pajak

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Bagi Hasil Pajak Ke kabupaten/kota. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bagi hasil pajak kabupaten/kota maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Beban transfer bagi hasil pajak	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Utang transfer bagi hasil pajak		XXX

Beban Transfer bagi hasil Pajak

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bagi hasil pajak ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada kabupaten/kota berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar :

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Utang transfer bagi hasil pajak	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas dikas daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Transfer bagi hasil pajak	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

Beban Transfer Bantuan Keuangan

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXXX	XXXXXX	X.X.X.XX.XX	Beban transfer bantuan keuangan ke kab/kota	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Utang transfer bantuan keuangan		XXX

Beban Transfer Bantuan Keuangan

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar :

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXX	XXXXX	X.X.X.XX.XX	Utang transfer bantuan keuangan	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas dikas daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXXXX	XXXXX	X.X.X.XX.XX	Transfer bantuan keuangan ke kab/kota	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

TERIMA KASIH

